

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 62**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 62 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN WAY KANANTAHUN ANGGARAN 2016**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 62**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 62 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN WAY KANANTAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 138);

26. Peraturan...

26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1...

## Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.44.346.945.471,84
b. Dana Perimbangan	Rp. 908.456.210.688,00
c. Lain-lain Pendapatanyang sah	<u>Rp.212.036.205.981,00</u>

Jumlah Pendapatan Rp. 1.164.839.362.140,84

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Belanja Pegawai	Rp. 479.572.903.342,20
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp 16.084.769.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.688.500.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 781.000.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 171.979.024.201,00
8) Belanja TidakTerduga	<u>Rp. 202.500.000,00</u>
	Rp. 671.308.696.543,20

b. BelanjaLangsung:

1) Belanja Pegawai	Rp. 8.641.360.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 222.470.666.680,00
3) Belanja Modal	<u>Rp.277.836.967.242,00</u>
	Rp. 508.948.993.922,00

Jumlah Belanja Rp.1.180.257.690.465,20  
Surplus/(Defisit) Rp. (15.418.328.324,36)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp. 65.494.894.090,65
b. Pengeluaran	<u>Rp. 13.825.385.950,00</u>

JumlahPembiayaanNetto Rp. 51.669.508.140,65

Sisalebih(kurang)pembiayaan  
anggarantahunberkenaan Rp. 36.251.179.816,29

Pasal 2...

## **Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

## **Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.



Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 19 September 2017

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 19 September 2017

**PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**SAIPUL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 62**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH ATAU (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	8.901.500.000,00	10.650.926.839,80	1.749.426.839,80	119,65
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.355.550.000,00	1.015.768.535,00	(339.781.465,00)	74,93
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.950.046.337,21	2.743.449.975,21	(206.596.362,00)	93,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.044.667.000,00	29.936.800.121,83	892.133.121,83	103,07
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)</b>	<b>42.251.763.337,21</b>	<b>44.346.945.471,84</b>	<b>2.095.182.134,63</b>	<b>104,96</b>
8					
9	<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
10	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	22.021.595.000,00	28.750.608.693,00	6.729.013.693,00	130,56
11	Dana Alokasi Umum	656.605.460.000,00	656.605.460.000,00	0,00	100,00
12	Dana Alokasi Khusus	289.648.374.000,00	223.100.141.995,00	(66.548.232.005,00)	77,02
13	<b>Jumlah Dana Perimbangan (10 s.d 12)</b>	<b>968.275.429.000,00</b>	<b>908.456.210.688,00</b>	<b>(59.819.218.312,00)</b>	<b>93,82</b>
14					
15	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
16	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	56.279.150.076,00	69.784.937.181,00	13.505.787.105,00	124,00
19	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	142.172.112.000,00	142.172.112.000,00	0,00	100,00
20	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	79.156.800,00	79.156.800,00	0,00
22	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (16 s.d 21)</b>	<b>198.451.262.076,00</b>	<b>212.036.205.981,00</b>	<b>13.584.943.905,00</b>	<b>106,85</b>
23	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7+13+22)</b>	<b>1.208.978.454.413,21</b>	<b>1.164.839.362.140,84</b>	<b>(44.139.092.272,37)</b>	<b>96,35</b>
24					
25	<b>BELANJA</b>				
26	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
27	Belanja Pegawai	516.007.153.950,86	479.572.903.342,20	(36.434.250.608,66)	92,94
28	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Hibah	16.261.854.000,00	16.084.769.000,00	(177.085.000,00)	98,91
30	Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000,00	2.688.500.000,00	(511.500.000,00)	84,02
31	Belanja Bagi Hasil	781.000.000,00	781.000.000,00	0,00	100,00
32	Belanja Bantuan Keuangan	171.987.602.720,00	171.979.024.201,00	(8.578.519,00)	100,00
33	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	202.500.000,00	(797.500.000,00)	20,25
34	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung (27 s.d 33)</b>	<b>709.237.610.670,86</b>	<b>671.308.696.543,20</b>	<b>(37.928.914.127,66)</b>	<b>94,65</b>
35					
36	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
37	Belanja Pegawai	9.749.555.000,00	8.641.360.000,00	(1.108.195.000,00)	88,63
38	Belanja Barang dan Jasa	243.379.921.730,00	222.470.666.680,00	(20.909.255.050,00)	91,41
39	Belanja Modal	297.193.551.372,00	277.836.967.242,00	(19.356.584.130,00)	93,49
40	<b>Jumlah Belanja Langsung (37 s.d 39)</b>	<b>550.323.028.102,00</b>	<b>508.948.993.922,00</b>	<b>(41.374.034.180,00)</b>	<b>92,48</b>
41	<b>JUMLAH BELANJA (34+40)</b>	<b>1.259.560.638.772,86</b>	<b>1.180.257.690.465,20</b>	<b>(79.302.948.307,66)</b>	<b>93,70</b>
42	<b>SURPLUS / (DEFISIT) (23-41)</b>	<b>(50.582.184.359,65)</b>	<b>(15.418.328.324,36)</b>	<b>35.163.856.035,29</b>	<b>30,48</b>
43					
44	<b>PEMBIAYAAN</b>				
45	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
46	Penggunaan SAL	65.482.832.052,65	65.494.894.090,65	12.062.038,00	100,02
47	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (46)</b>	<b>65.482.832.052,65</b>	<b>65.494.894.090,65</b>	<b>12.062.038,00</b>	<b>100,02</b>
48					
49	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
50	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
51	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	13.900.647.693,00	12.825.385.950,00	(1.075.261.743,00)	92,26
52	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (50+51)</b>	<b>14.900.647.693,00</b>	<b>13.825.385.950,00</b>	<b>(1.075.261.743,00)</b>	<b>92,78</b>
53	<b>PEMBIAYAAN NETTO (47-52)</b>	<b>50.582.184.359,65</b>	<b>51.669.508.140,65</b>	<b>1.087.323.781,00</b>	<b>102,15</b>
54					
55	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (42+53)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.251.179.816,29</b>	<b>36.251.179.816,29</b>	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA